

128/89
C1(2)

Hukum

(27)

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENDAPATAN ASLI DESA HUBUNGANNYA DENGAN
KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH-
AN DAN PEMBANGUNAN DESA DI KEC. PARIAMAN
KOTIF. PARIAMAN

YUSLIM, SH.MH.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1989

BAB. I

P E N D A H U L U A N

. Latar belakang

Pemerintahan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan erendah, yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, alam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis. Karena jika diperhatikan lebih dari 80 % penduduk Indonesia berada di perdesaan. Di tingkat Desa pulalah konsentrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Desa yang sejak zaman penjajahan sampai sekarang tetap mendapat pengakuan sebagai desa otonom. Patut diakui, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat di mana bertempat tinggal sejumlah manusia yang berhak mengatur dirinya sendiri adalah suatu organisasi masyarakat hukum yang telah tua umurnya dan bahkan lebih tua dari organisasi masyarakat hukum yang disebut "negara" sekarang ini.

Persekutuan hukum yang dijumpai diwilayah nusantara Indonesia itu bermacam-macam bentuk dan luasnya, di antara persekutuan hukum itu tidak banyak terdapat perbedaan, hanya ada perbedaan derajat saja. Bentuk persekutuan hukum yang bermacam-macam itu tetap tumbuh dan terpelihara. Bahkan pada masa kemerdekaan secara konstitusional persekutuan hukum itu mendapat pengaturan. Hal itu dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan " II. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "zelfbesturende landschappen" dan "volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa".

Adanya kata seperti dalam penjelasan Pasal 18 tersebut di atas menunjukkan bahwa penafsiran yang dipakai bersifat enumeratif bukan limitatif, jadi masih ada jenis dan sebutan lain yang digunakan untuk sebutan desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab V ini akan dikemukakan hasil penelitian, kemudian akan uraikan pembahasan mengenai data yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Sebelum sampai pada uraian hasil penelitian, terlebih dahulu dikemukakan deskripsi beberapa aspek yang dianggap relevan dengan materi penelitian. Gambaran desa yang dijadikan sampel adalah menyangkut aspek.

Pertama, status desa, sehubungan dengan status desa disini adalah berkenaan dengan adanya sebutan desa tunggal yaitu desa yang di dalam desa itu tidak terdapat atau terbagi dalam dusun-dusun. Kemudian sebutan desa jamak yaitu desa yang terbagi dalam beberapa dusun.

Berdasarkan data yang diperoleh lewat jawaban dari kuesioner dan pengamatan penulis dari sampel yang ditarik maka dapat digambarkan desa tunggal adalah terdiri dari desa :

1. Desa Palak Anek
2. Desa Pasir Sunur
3. Desa Padang Cakur
4. Desa Sikabu.

Kemudian Desa jamak yaitu :

1. Desa Marunggi
2. Desa Taluk
3. Desa Kampung Apar
4. Desa Batang Tajongkek
5. Desa Paser Kura Taji
6. Desa Simpang
7. Desa Pauh
8. Desa Sei Kasai.

Pada desa-desa tersebut di atas dapat pula dikemukakan perangkat pemerintahan desa sebagai terlihat dibawah ini. Kecuali desa Palak Anek, di mana desa ini hanya mempunyai satu saja kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintahan. Sedangkan desa-desa lain mempunyai perangkat pemerintahan

BAB. VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Sumatera Barat telah ditentukan bahwa Pendapatan Asli Desa berupa :
 - a. Kekayaan Desa
 - b. Hasil dari swedaya dan partisipasi masyarakat Desa
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat desa
 - d. pungutan desa
 - e. bangunan milik desa
 - f. Lain-lain dari hasil usaha desa yang sah
2. Secara umum tidak terdapat di desa, apa yang disebut dengan tanah kas desa, maupun tanah bengkek atau sejenisnya yang merupakan penghasilan langsung bagi perangkat desa.
3. Bahwa tidak terdapat kekayaan desa yang berasal dari pemandian umum, pasar desa, obyek rekreasi dan bangunan milik desa. Yang ada hanyalah yang dapat digolongkan pada lain-lain kekayaan desa.
4. Pendapatan Asli Desa yang bersumber pada : Hasil swadaya dan Partisipasi masyarakat desa; hasil gotongroyong masyarakat sulit dinilai dengan uang; dan sulit menetapkannya terprogram.
5. Hanya pungutan desa yang secara nyata dapat ditentukan perkiraan penerimaan PAD secara terencana; jenis pungutan desa yang telah dilakukan adalah
 - pas jalan
 - keterangan kelakuan baik
 - keterangan bebas G-30 S
 - Keterangan nikah
 - SKBD/SKBL

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afan Gaffar, Peningkatan sumber daya manusia perdesaan sebagai partisipan pembangunan, Makalah dalam seminar nasional, Pengembangan Pemerintahan Desa sebagai basis pembangunan nasional. Fak. Hukum 17 Agustus, Semarang, Januari 1989
- Ateng Syafrudin, Menjelang 10 tahun berlakunya U.U no.5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Makalah dalam seminar Nasional, Fak Hukum Univ.17 Agustus Semarang, Januari 1989.
- Alidinar Nurdin, Prospek pembangunan perdesaan di Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Alumni Unand Padang, Desember 1988.
- Basjir Radja, Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan Perdesaan di Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Ikatan Alumni Unand, Padang, Desember 1988.
- Daeng Sudiro, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Angka Bandung, 1984.
- Kansil, C.S.T, Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dilengkapi dengan pemerintahan Desa, Angka, Bandung 1984.
- , Desa kita dalam peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984
- Lubis, M. Solly, Pergeseran Garis-garis Politik dan Perundangan Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung, 1984
- Momon Soetisna Sendjaja; Sjachran Basah, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, Alumni, Bandung, 1983.
- Sjafrizal, Pola pembangunan daerah perdesaan Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Ikatan Alumni Unand Padang, Desember 1988.
- Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sihombing. Herman, Dampak perubahan pemerintahan dari Nagari ke Desa terhadap pembangunan perdesaan di Sumatera Barat, Makalah dalam Seminar Alumni Unand Padang, Desember 1988.
- Soe Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan daerah Daerah, Jilid III, Gunung Agung 1968.
- Saliziduhu NDreha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Sina Aksara, Jakarta 1984.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa
- Simpanan Perda Tk I Sumbar tentang pelaksanaan UU No 5/1979 dan Sina Pemerintahan Desa, 1987.